

ANALISA SWOT TUPOKSI APARAT INTELIJEN (Studi Kasus : Memaksimalkan Fungsi Babinsa Dalam Masa Pandemi Covid-19)

Tritiya A.R. Arungpadang, Stenly Tangkuman

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado

Abstrak

Kodam XIII Merdeka merupakan komando kewilayahan pertahanan yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Kodam XIII Merdeka memiliki tanggung jawab menjaga perbatasan NKRI dengan Filipina. Berhadapan dengan kompleksitas permasalahan dan ancaman yang tengah berkembang, seperti terorisme, komunisme, radikalisme dan konflik sosial, bahkan situasi pandemi Covid-19 saat ini memerlukan aparat intelijen yang memiliki kepekaan, ketajaman dan ketanggapan dalam menganalisa data, laporan yang masuk dan serta situasi yang ada di masyarakat. Tujuannya dalam situasi dan kondisi apapun, tupoksi (tugas pokok dan fungsi) aparat intelijen dapat terlaksana dalam mendukung tugas pokok Kodam XIII Merdeka. Metode SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, and threats*) telah menjadi salah satu *tools* alat yang berguna dalam berbagai bidang. *Tools* ini dapat juga digunakan sebagai aplikasi alat bantu analisa dan pembuatan keputusan dalam penentuan program atau kegiatan yang harus dilakukan terkait fungsi intelijen. Tujuan pelaksanaan PKM ini adalah memberikan wawasan kepada *stake holder* terkait serta mendukung pelaksanaan tupoksi saat terjadinya pandemi Covid-19. Obyek aparat intelijen yang diangkat adalah seorang Babinsa.

Kata kunci : *analisis SWOT, tupoksi aparat intelijen, Babinsa*

1. Pendahuluan

Kodam XIII Merdeka merupakan komando kewilayahan pertahanan yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Kodam XIII Merdeka memiliki tanggung jawab menjaga perbatasan NKRI dengan Filipina. Berhadapan dengan kompleksitas permasalahan dan ancaman yang tengah berkembang, seperti terorisme, komunisme, radikalisme, konflik sosial dan lain sebagainya, memerlukan aparat intelijen yang memiliki kepekaan, ketajaman dan ketanggapsegeraan, serta mampu menganalisa data, laporan yang masuk dan pengawasan yang melekat dari setiap perubahan situasi yang terjadi, agar dapat menjamin terlaksananya tanggung jawab dalam mendukung tugas pokok Kodam XIII Merdeka.

Menurut Mustiningsih, manajemen berbentuk sistem yang komponennya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan komponennya, manajemen suatu institusi dapat terdiri atas (manajemen) : program, masyarakat, aparat intelijen, pembiayaan, sarana dan prasarana, relasi institusi dan masyarakat, dan budaya dan lingkungan. Kedua, sumberdaya institusi meliputi manusia, dana, sarana dan prasarana. Ketiga, strategi yang berpusat pada masyarakat. Keempat, implementasi budaya dan lingkungan yang kondusif. Kelima, peran serta masyarakat. Terakhir, pencapaian tujuan peningkatan mutu.

Permasalahan yang sering terjadi pada manajemen berbasis institusi adalah pada tahapan perencanaan. Padahal perencanaan merupakan awal dari proses manajemen yang sangat menentukan keluaran dari sistem, dalam hal ini Kodam sebagai institusi militer.

Jika dirangkumkan beberapa permasalahan tersebut terkait manajemen institusi adalah :

- Identifikasi tupoksi
- Perencanaan kebutuhan
- Analisis kebutuhan dan perencanaan
- Identifikasi potensi lingkungan sekitar
- Penyusunan program
- Perencanaan program kegiatan

Berdasarkan survey awal ke lokasi, wawancara dengan pihak Asintel Kodam, identifikasi awal masalah tahap perencanaan institusi, dialami juga oleh Kodam XIII Merdeka, sebagai rencana lokasi pelaksanaan program kemitraan masyarakat.

2. Dasar Teori

Manajemen adalah proses mengarahkan dan memfasilitasi kerja orang-orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Proses manajemen berbasis institusi adalah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*actuating – leading*) dan pengendalian (*controlling*). Pimpinan beserta staf yang terlibat dalam semua proses manajemen harus mengetahui tanggung jawab mereka masing-masing.

Tahap perencanaan (*planning*) berbagai macam program di Kodam, sebagai lembaga pertahanan, merupakan tahapan awal dalam manajemen berbasis Kodam. Keberhasilan membuat rencana program di Kodam akan sangat menentukan kelancaran pelaksanaan tahap-tahap berikutnya yaitu pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Keberhasilan pelaksanaan keempat proses ini yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan Kodam sebagai lembaga pertahanan.

Analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, and threats*) telah menjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia industri. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk

digunakan sebagai aplikasi alat bantu pembuatan keputusan dalam pembuatan program-program di Kodam. Proses penggunaan manajemen analisis SWOT menghendaki adanya survei internal tentang *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan) program, beserta survei eksternal atas *opportunities* (ancaman) dan *threats* (peluang/kesempatan). Pengujian eksternal dan internal yang terstruktur adalah sesuatu yang unik dalam dunia perencanaan dan pengembangan program lembaga pertahanan.

Semua pihak yang terlibat dalam tahap perencanaan, sebagai bagian proses manajemen, harus mengetahui beberapa hal mendasar, yaitu :

- Definisi dan proses manajemen (berbasis institusi)
- Proses perencanaan
- Proses evaluasi diri
- Penggunaan metode SWOT sebagai alat bantu perencanaan

Sehingga alternatif solusi yang ditawarkan kepada aparat intelijen di Kodam XIII Merdeka adalah transfer wawasan dan ilmu, dan teknologi terkait proses perencanaan tugas pokok dan fungsi di Kodam, yang nantinya akan dapat digunakan sendiri oleh mereka. Transfer ilmu ini akan dilakukan dalam bentuk pelatihan dan *focus group discussion*.

3. Metode Pelaksanaan

Berdasarkan analisis situasi, perumusan masalah dan solusi yang ditawarkan diatas telah dijelaskan adanya transfer wawasan dan ilmu tentang proses manajemen, prosedur perencanaan dan penggunaan analisis SWOT kepada mitra PKM. Melalui kegiatan PKM ini dilakukan pendampingan untuk mengenali lebih detail permasalahan yang terjadi terkait tupoksi dan memberikan pendampingan langsung *berdasarkan* ilmu dan teknologi terkait. Juga dilakukan dukungan pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi aparat intelijen dalam melaksanakan tupoksi mereka.

Materi-materi tentang manajemen, prosedur perencanaan, SE dan SWOT disiapkan tim pelaksana dan diberikan kepada mitra PKM. Mitra PKM ini terdiri atas 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah pimpinan intelijen, disebut sebagai Mitra I. Sedang kelompok yang kedua adalah aparat intelijen, disebut sebagai Mitra II. Mitra I diharapkan makin terasah dalam proses identifikasi tupoksi sebagai bagian dari perencanaan program dan memiliki wawasan makin luas tentang pelaksanaan manajemen. Bagi Mitra II, diharapkan nantinya akan siap dalam menganalisa secara sederhana *tupoksi* untuk dikerjakan.

Kontribusi yang diharapkan dari kegiatan ini adalah para peserta diharapkan bertambah wawasan dan ilmunya tentang materi yang diberikan, serta mampu menggunakan analisis SWOT sebagai alat bantu identifikasi tupoksi *aparat intelijen* dalam proses perencanaan. Partisipasi mitra dalam

pelaksanaan program ini adalah memberikan informasi detail tentang permasalahan yang terjadi.

3. SWOT Tupoksi Intelijen

Analisis SWOT intelijen adalah suatu bentuk analisis situasi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan, kelemahan organisasi intelijen dan kesempatan serta ancaman dari lingkungan sekitar untuk merumuskan strategi yang tepat bagi organisasi dalam melakukan suatu tindakan. Secara prosedural, analisis SWOT dilakukan dengan cara membandingkan faktor eksternal dan faktor internal organisasi, yaitu sebagai berikut :

Strengths (kekuatan) adalah segala hal yang dibutuhkan pada kondisi yang sifatnya internal organisasi (aparat intelijen) agar tupoksi dapat berjalan maksimal. Misalnya: kekuatan keuangan, motivasi aparat yang kuat, nama baik organisasi terkenal, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih, aparat yang pekerja keras, memiliki jaringan organisasi yang luas, dan lain sebagainya.

Weaknesses (kelemahan) adalah terdapatnya kekurangan pada kondisi internal organisasi (aparat intelijen), sehingga berakibat pada tupoksi yang berjalan belum maksimal. Misalnya; kekurangan dana, memiliki aparat intelijen baru yang belum terampil, belum memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup, kurang kreatif dan malas, tidak adanya dukungan teknologi dan sebagainya.

Opportunities (peluang) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif, yang dapat dan mampu mengarahkan aparat intelijen melaksanakan tupoksi yang ideal. Misalnya; kebutuhan lingkungan sesuai dengan tujuan organisasi, masyarakat sedang menghadapi perubahan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat yang bagus, belum ada pihak lain yang melihat peluang tersebut, banyaknya dukungan pihak ketiga terkait dengan tupoksi aparat intelijen dan lainnya.

Threats (ancaman) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang mampu menghambat pergerakan aparat intelijen. Misalnya: masyarakat sedang apatis dan pesimis terhadap aparat karena kondisi yang sulit, tupoksi aparat intelijen dapat dilakukan oleh pihak lain sehingga ada banyak pesaing, isu yang dibawa oleh internal organisasi sudah basi dan contoh lainnya.

4. Pembahasan

Komando daerah militer (Kodam) adalah komando utama pembinaan dan operasional wilayah TNI Angkatan Darat. Kodam memiliki tugas

membina kesiapan operasional seluruh komandonya dan operasi pertahanan aktif di darat pada satu atau lebih provinsi. Komando resort militer (Korem) merupakan kesatuan yang berada di bawah Kodam melingkupi beberapa Kodim dan didukung unit Polisi Militer, Peralatan, Pembekalan dan Angkutan, Zeni Bangunan, Kesehatan, Perhubungan dan beberapa satuan lainnya. Kodim (komando distrik militer) adalah satuan di bawah Korem meliputi sebuah daerah tingkat II. Koramil (komando rayon militer) adalah satuan TNI AD dibawah Kodim, meliputi sebuah kecamatan.

Ternyata satuan teritorial TNI AD (termasuk yang ujung tombak fungsi intelijen) di tingkat paling bawah adalah Babinsa (bintara pembina Ddesa), yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Babinsa berada di bawah Koramil, sebagai bagian dari Kodim dan Korem, sehingga menginduk pada Komando Daerah Militer. Dalam buku petunjuk induk tentang Pembinaan Teritorial (surat keputusan Kasad no. Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007), Babinsa merupakan unsur pelaksana Koramil yang bertugas melaksanakan bimbingan teritorial (binter) di wilayah pedesaan/kelurahan, yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan aparat terkait di desa/kelurahan serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Tugas pokok Babinsa adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas pokok prajurit TNI terutama dalam mengaplikasikan 5 kemampuan territorial dan 8 wajib TNI.
2. Melaksanakan tugas dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta membina / membimbing masyarakat terkait dengan kamtibmas.
3. Menangkal berbagai bahaya, gangguan dan ancaman yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba, *illegal logging*, maupun terorisme.
4. Melaksanakan tugas intelijen.
5. Melaksanakan kegiatan bakti sosial dimasyarakat disaat normal atau sebagai akibat adanya bencana alam maupun peristiwa lainnya.
6. Melaksanakan berbagai kegiatan dibidang pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat atau melaksanakan pembinaan dan penyuluhan.
7. Melaksanakan tugas pembinaan teritorial.
8. Bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Berdasarkan tupoksi no 4 dan 5 diatas, keberadaan seorang Babinsa sangatlah penting dalam pelaksanaan tupoksi seorang aparat intelijen dalam lingkup Kodam, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Sedangkan menurut peraturan KSAD no. 19/IV/2008 tertanggal 8 April 2008,

seorang Babinsa berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan teritorial sesuai petunjuk atasannya. Secara pokok, tugas-tugas mereka meliputi mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografi, demografi, hingga sosial dan potensi nasional di wilayah kerjanya, yaitu aspek SDM, SDA, sarana-prasarana dan infrastruktur. Pada saat ini, dengan adanya pandemi Covid-19 di seluruh dunia (termasuk Indonesia didalamnya), seorang Babinsa akan menjadi salah satu ujung tombak berbagai informasi dari pedesaan /kelurahan.

Pemerintah melalui Kemendes PDTT (Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi) telah membentuk gugus tugas penanganan Covid-19 (korona) di tingkat desa. Pembentukan gugus tugas tertuang dalam surat edaran Kemendes no. 8 tahun 2020 tentang desa tanggap Covid-19 dan penegasan program padat karya tunai desa. Isi surat tersebut adalah bagaimana masyarakat tetap menjalankan padat karya tunai dan cara penanganan dan pencegahan Covid-19. Gugus tugas penanganan Covid-19 di tingkat desa dipimpin Kepala Desa (Lurah) dan wakilnya diamanahkan kepada Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Aparat pelaksana terdiri dari perangkat desa, aparat BPD, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, agama, adat, hingga para pendamping profesional. Gugus tugas penanganan Covid-19 tingkat desa juga bemitra dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan pendamping desa. Disediakan *call center* gugus khusus untuk tugas penanganan Covid-19 yaitu 1500040.

Berdasarkan uraian diatas, sebagai implementasi analisa SWOT dan proses pencarian informasi data digital dari internet, terdapat beberapa cara memaksimalkan fungsi Babinsa sebagai ujung tombak TNI dalam hal tupoksi intelijen yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Melaksanakan pendampingan satgas Covid-19 dalam melaksanakan *tracing* warga yang terkena Covid-19 di setiap wilayah kecamatan sekaligus melakukan sosialisasi Inpres no 06 tahun 2020 dan maklumat Kapolri. Keberadaan Babinsa (dan Bhabinkamtibmas) akan memudahkan pelaksanaan fungsi gugus tugas karena mereka mengenal wilayah teritorial yang ada (fungsi intelijen) serta melaksanakan fungsi keamanan dan ketertiban.
2. Melakukan komunikasi sosial (komsos) kepada masyarakat. Pembinaan komsos sebagai penunjang tugas aparat teritorial harus dimiliki oleh seorang Babinsa. Karena dengan Komsos diharapkan seorang Babinsa akan mengetahui tentang kondisi sosial masyarakatnya, sekaligus untuk mendapatkan data dan informasi wilayah binaan. Mengefektifkan kegiatan komsos guna menciptakan

- interaksi dengan masyarakat, dimaksimalkan dengan menjaga kekompakan dengan Bhabinkamtibmas (bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat), sebagai mitra kerja dari POLRI. Cara ini menjadi sumber informasi yang penting.
3. Berkepanjangannya pandemi Covid-19 ini, juga harus diantisipasi secara dini dengan menjaga ketahanan pangan. Memanfaatkan lahan tidur, dapat meningkatkan ketahanan pangan dalam menghadapi pandemi yang masih berlangsung. Pemanfaatan lahan tidur yang ada ini tidak merugikan, tetapi memberikan manfaat untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan. Babinsa dapat menjadi motivator pelaksanaan program ini.
 4. Memberikan imbauan sebagaimana anjuran pemerintah agar melaksanakan program 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Serta memberikan penekanan tentang pentingnya protokol kesehatan (prokes) yang harus dipenuhi demi menjaga diri dan orang terdekatnya dari penyebaran virus corona.
 5. Membantu tim gugus tugas dalam melakukan penyemprotan di tempat tinggal warga yang terinfeksi Covid-19.
 6. Mengantar kebutuhan sembako kepada pihak keluarga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri.
 7. Mengabdikan diri sebagai pengajar di masa pandemi Covid-19. Terdapat beberapa Babinsa yang dengan sukarela menjadi relawan guru karena banyaknya siswa di pedesaan yang tidak memiliki ponsel, sehingga kesulitan untuk mengikuti belajar daring.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian PKM Kodam XIII Merdeka tentang Penggunaan Analisa SWOT dalam Proses Perencanaan Program di Kodam telah terlaksana dengan baik. Respon pihak pimpinan Kodam sangat baik, namun terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan strategi pelaksanaan untuk mencapai tujuan serta dukungan terhadap aparat intelijen dalam menghadapi kondisi pandemi yang terjadi.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada :

- ✓ Pimpinan dan staf, LPPM Unsrat serta Fakultas Teknik Unsrat

- ✓ Asintel Kodam XIII Merdeka Kol. (Inf) Agus Bhakti, pimpinan dan staf di Satintel Kodam XIII Merdeka yang telah membantu pelaksanaan kegiatan PKM ini.

Daftar Pustaka

- Armawi, A. (2013). Kajian Penguatan Komunitas Intelijen Daerah. *Mimbar Hukum*. Vol. 25. No.1. Hal. 68 – 75.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015) Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016. KepMen Pertahanan no. Kep/1255/M/XII/2015.
- Kementerian Pertahanan RI. (2018) Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018. *WiRA*. Vol. 70.No.54.
- Rangkuti, F., (2002) *Analisis SWOT : Teknik membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama
- Sekretariat Negara RI. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., dan Gilbert, D.R., (1995). *Management*. 6ed. New Jersey : Prentice Hall Int. Ed.
- Stoner, J.A.F., dan Wankel, C., (2012). *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dalam Manajemen*. Semarang : Rineka Cipta.
- Widjajanto, A. dan Wardhani, A. (2008). *Hubungan Intelijen – Negara 1945-2004*. Pacivis UI.

Lampiran

